

PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Muh. Ikram Nur Ilahi¹, Achmed Sukendro², M. Adnan Madjid³, Pujo Widodo⁴

^{1,2,3}Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: iamnurilah16@gmail.com

ABSTRAK

Kompleksitas konflik yang terjadi di Papua menjadi salah satu alasan mengapa konflik ini belum terselesaikan sampai sekarang. Aspek kepemimpinan memainkan peran penting dalam penanganan dan penyelesaian konflik, termasuk konflik di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan kepemimpinan strategis, dengan mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan konsep John Burton (1990) yang menekankan pada *needs* atau kebutuhan untuk memahami penyebab umum konflik di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memanfaatkan studi kepustakaan atau *literature review* dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan setiap presiden dalam menangani konflik Papua sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan kondisi politik pada masanya. Kepemimpinan strategis dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik. Pendekatan strategis seperti dialog yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan kelompok lainnya dapat meredakan ketegangan dan memperbaiki hubungan di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam konteks kepemimpinan strategis, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, sambil memastikan implementasi Otonomi Khusus yang efektif dan adil.

Kata Kunci: Konflik, Papua, Kepemimpinan Strategis

ABSTRACT

The complexity of the conflict that occurred in Papua is one of the reasons why this conflict has not been resolved until now. Leadership plays an important role in handling and resolving conflicts, including conflicts in Papua. This study aims to analyze efforts to resolve conflicts in Papua through a strategic leadership approach, by examining the policies of the Indonesian government from Orde Lama, Orde Baru, to the post-reform period. This research uses the concept of John Burton (1990) which emphasizes the need to understand the common causes of conflict in Papua. The research method used is qualitative with a descriptive approach, which utilizes literature studies or literature reviews from various relevant sources such as books, scientific articles, and other related documents. The findings of the study show that the policies of each president in handling the Papuan conflict are greatly influenced by leadership factors and political conditions at that time. Strategic leadership can result in more effective policies in conflict resolution. Strategic approaches such as dialogue involving the central government, local governments, indigenous peoples, and other groups can ease tensions and improve relations in the future. The conclusion of this study is that in the context of strategic leadership, it is critical for the Indonesian government to continue to develop policies that are responsive to the needs and aspirations of the Papuan people, while ensuring the effective and equitable implementation of Special Autonomy.

Keywords: Conflict, Papua, Strategic Leadership.

PENDAHULUAN

Konflik Papua merupakan konflik yang sudah sejak lama berlangsung dan belum menemukan penyelesaian sampai saat ini. Konflik ini muncul sebab keinginan Masyarakat Papua untuk Merdeka sebagai sebuah negara sendiri, yang diperjuangkan melalui Organisasi Papua Merdeka. Konflik ini berawal dari ketika Indonesia

mengklaim seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, termasuk Pulau Papua, yang kemudian menjadi sumber sengketa karena Belanda menganggap Papua sebagai wilayah terpisah yang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Sengketa wilayah Papua Barat dibahas pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949, tetapi pertemuan ini tidak berhasil

mencapai kesepakatan antara kedua pihak. Pada Desember 1950, sengketa ini diangkat ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian menetapkan bahwa Papua Barat berhak merdeka berdasarkan ketentuan dalam Piagam PBB pasal 73(e) (United Nations, 1945). Namun, keputusan PBB ini tidak diterima oleh kedua pihak (Firdausi, 2019).

Pada 1 Desember 1961, Belanda mendeklarasikan kemerdekaan Papua melalui Komite Nasional Papua (KNP) di Hollandia (Jayapura) Dalam deklarasi ini Belandan memberikan nama "West Papua" dengan Burung Mambruk sebagai simbol negara. Adapaun Bintang Kejora merupakan bendera negara dan Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaannya. KNP juga mengusung semboyan "One People One Soul" sebagai semboyan Negara. Respon Indonesia terhadap deklarasi yang dilakukan oleh pihak Belanda adalah dengan mencetuskan Tri Komando Rakyat (TriKora) yang merupakan upaya Indonesia untuk merebut Papua melalui operasi militer di Papua Barat. Operasi TriKora sukses membuat Belanda mundur dari Papua, hal ini mengubah status konflik di Papua menjadi tanggung jawab PBB (Kaisupy & Maing, 2021). Solusi yang diberikan oleh PBB terhadap konflik di Papua adalah dengan melaksanakan Referendum. ada tahun 1969, diadakan referendum yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Papua memilih untuk tetap tergabung dengan Indonesia (Pamungkas, 2015).

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) kemudian menimbulkan konflik baru karena dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan "one man one vote" melainkan dengan sistem perwakilan yang melibatkan kepala suku. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan mengenai integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Masyarakat Papua menganggap bahwa proses integrasi Papua ini cacat dan tidak sesuai dengan proseedurkemudian

melahirkan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan dan perjuangan kelompok OPM seringkali menyebabkan konflik dengan eskalasi mulai dari tingkat rendah hingga konflik bersenjata (Kusumawati, 2019).

Beberapa tulisan mengenai akar dan sumber konflik di Papua sebenarnya sudah dimuat dalam beberapa tulisan yang terbit baik dalam bentuk buku maupun tulisan. Buku yang berjudul "Papua Roadmap" adalah karya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyimpulkan bahwa dalam konflik Papua terdapat empat permasalahan utama, yakni marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan militer, serta proses integrasi Papua ke Indonesia. (Widjojo, 2009). Seorang ahli sejarah politik Papua, Richard Chauvel menuliskan bahwa masalah utama dalam konflik Papua meliputi kekecewaan atas integrasi Papua ke Indonesia, persaingan antara elit lokal Papua dan elit dari luar yang mendominasi pemerintahan, Pembangunan ekonomi yang kurang merata beberapa daerah serta Masyarakat papua yang merasa termarginalisasi akibat banyaknya pendatang. Pandangan ini kemudian menjadi sebuah alasan yang kuat bagi kelompok Masyarakat di Papua yang tidak puas sehinggakan melahirkan gerakan pro-kemerdekaan Papua (Anugerah, 2019).

Selain permasalahan diatas, kebijakan pemerintah Indonesia dalam penangan konflik di Papua juga menjadi salah satu alasan mengapa konflik ini sulit untuk diselesaikan. Evaluasi terhadap kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sering kali dinilai gagal dalam menangani gerakan separatisme dan seringkali terlibat dalam pelanggaran HAM wilayah Papua (Sagita, 2021). Faktor kepemimpinan memegang peranan krusial dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi upaya penyelesaian konflik. Oleh karena itu berdasarkan uraian sebelumnya, menjadi penting untuk

menyelidiki lebih jauh upaya-upaya penyelesaian konflik dari perspektif kepemimpinan strategis dengan mengkaji perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia di setiap periode kepemimpinan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika kepemimpinan serta kebijakan dalam Upaya penyelesaian konflik di Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis penyelesaian konflik di Papua dari perspektif kepemimpinan strategis. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data melalui studi kepustakaan atau literature review yang menggunakan data yang bersumber dari data primer seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen terkait lainnya (Creswell, 2014). Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks konflik dan berbagai strategi kepemimpinan untuk menjadi acuan dalam memberikan masukan dan saran dalam menangani dan menyelesaikan konflik tersebut. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali dan mengkaji berbagai teori dan temuan empiris yang ada guna menyusun analisis yang komprehensif dan menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta rekomendasi yang berguna bagi penyelesaian konflik di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Umum Konflik di Papua

Konflik di Papua dapat dianalisis menggunakan konsep John Burton (1990) yang menyoroti pentingnya kebutuhan atau "needs", dimana bagi masyarakat Papua needs ini adalah sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan. Kebutuhan atau needs yang dimaksud ini berupa pengakuan identitas, pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan jaminan keamanan yang seharusnya menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi bagi rakyat Papua. Kedua pihak

yang berkonflik seolah tidak mendapatkan Solusi serta mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan konflik ini (Rustiadi, 2018). Secara umum, menurut pandangan Brown (1996), konflik dapat disebabkan oleh empat kelompok faktor utama yaitu Struktural, Politik, Sosial Ekonomi, dan Persepsi/Budaya. Faktor-faktor ini penting karena apabila suatu negara mampu mengelola kondisi-kondisi umum ini dengan baik, konflik dapat diminimalisir. Sebaliknya, buruknya pengelolaan terhadap faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya konflik (Sudira, 2022). Adapun penjelasan mengenai faktor tersebut dalam konteks konflik Papua yaitu:

a. Faktor Struktural

Masalah struktural seperti korupsi, administrasi yang tidak kompeten, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi faktor penyebab konflik di Papua yang berlarut-larut. Ketidakmampuan negara dalam mengatasi konflik ini memiliki dampak signifikan, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah (Saputra, 2019). Salah satu peristiwa terkait adalah pengibaran bendera Bintang Kejora oleh Forum Pemuda Mahasiswa Papua (FPMP) yang dilakukan di beberapa kota besar seperti Timika, Wamena, Fakfak, Manokwari, dan Jayawijaya. Adapun tuntutan dalam aksi ini adalah referendum sebagai solusi dari masa depan masyarakat Papua (Sudira, 2022). Kurangnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia menjadi alasan mengapa aksi seperti ini kerap terjadi.

b. Faktor Politik

Kekuasaan dan politik menciptakan ketidakadilan dalam sistem politik di Indonesia, hal ini menyebabkan rasa nasionalisme dalam hati Masyarakat Papua tidak tumbuh. Dinamika kepentingan politik antar kelompok elit berimbang pada konflik di Papua. Kebijakan

yang dipengaruhi oleh faktor politik cenderung tidak adil dan sering kali menggunakan operasi dengan pendekatan kekerasan, yang hanya memperburuk situasi konflik. Beberapa kebijakan pemerintah antara lain Operasi Soddar (1965-1967), Operasi Bharatayuda (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Pembersihan Termasuk Operasi I dan II (1981), Operasi Galan I dan II (1982), Operasi Tamba (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985). Situasi ini disebabkan oleh belum terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, seperti Wasiolu (2001), Wamena (2003), Paniai (Desember 2014) dan Biak berdarah yang masih dalam tahap penyelidikan (Juli 1998) (Affan, 2016).

c. Faktor Sosial/Ekonomi

Konflik di Papua dalam konteks sosial ekonomi mencakup tiga aspek utama yaitu sistem ekonomi yang diskriminatif, pembangunan yang masih belum merata serta masalah modernisasi ekonomi. Hal ini menghasilkan perasaan marginalisasi dan diskriminasi ekonomi yang terstruktur terhadap penduduk Papua. Tingginya indeks kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di Papua menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya hidup dalam kondisi miskin. Kondisi kemiskinan struktural ini dipicu oleh kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kesempatan ekonomi yang terbatas bagi orang Papua untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti dalam sektor pertambangan, penebangan kayu, perikanan, dan pertambangan.

Eksplorasi sumber daya alam yang terjadi di Papua saat ini telah menyebabkan ketimpangan dalam pembagian kekayaan alam dan

menjadi penyebab konflik dalam konteks ekonomi. Masalah ini menjadi semakin kompleks dengan masuknya pendatang yang dominan dalam sektor ekonomi Papua, mengakibatkan protes dari masyarakat asli Papua yang merasa terancam akan hilangnya mata pencaharian dan merasa tidak lagi menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Hal ini menciptakan perbedaan budaya, gaya hidup, praktik keagamaan, status sosial, dan kekuasaan di Papua. (Sugandi, 2008).

Masyarakat Papua memandang bahwa pemerintah pusat kurang serius dalam menangani isu-isu di Papua, yang tercermin dari kebijakan dan kegagalan pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan di Papua belum berhasil mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat Papua. Tantangan yang dihadapi termasuk kekerasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial-ekonomi, migrasi tenaga kerja dari luar Papua, dan marginalisasi masyarakat asli Papua.

d. Faktor Budaya

Secara sosial dan budaya, terdapat perbedaan signifikan antara masyarakat Indonesia dan Papua. Mayoritas penduduk Indonesia berasal dari kelompok etnis Melayu, sementara masyarakat Papua termasuk dalam kelompok etnis Melanesia dengan ciri-ciri ras Negroid di wilayah Pasifik. Secara fisik dan sosial, masyarakat Papua memiliki pandangan dunia dan gaya hidup yang unik. Mereka memiliki sistem otoritas yang kuat dalam mengatur dan mengembangkan kebutuhan mereka, serta menyelesaikan masalah dengan berlandaskan pada hukum adat yang mengatur hak dan kewajiban setiap

individu dalam komunitas mereka. Dampaknya, mereka sering mengalami tantangan dalam menghadapi konflik budaya dengan norma-norma mayoritas yang diterapkan di Indonesia (Anugerah, 2019).

Faktor budaya dan persepsi telah diidentifikasi sebagai sumber konflik internal, terutama dalam bentuk diskriminasi terhadap budaya kelompok minoritas. Kurangnya penghargaan terhadap kebudayaan unik Papua adalah masalah serius yang meningkatkan rasa diskriminasi terhadap penduduk Papua. Sebagai contoh, Operasi Koteka di Wamena pada akhir tahun 1970-an memaksa penduduk asli untuk meninggalkan nilai-nilai tradisional mereka dan beralih ke gaya hidup modern, termasuk mengenakan pakaian lain selain koteka. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan yang merendahkan identitas lokal masyarakat. Akibatnya, masyarakat Papua merasa bahwa nilai-nilai budaya yang mereka lestarikan selama bertahun-tahun tidak dihargai dengan baik (Sudira, 2022).

Peran Kepemimpinan Strategis dalam Penyelesaian Konflik

Kepemimpinan merupakan proses yang memengaruhi kegiatan kelompok terorganisir dalam mencapai tujuan tertentu (Rauch & Behling, 1984). Selain itu, kepemimpinan juga dapat dipahami sebagai proses yang memberikan arti terhadap upaya bersama, yang kemudian mendorong keinginan untuk berusaha mencapai tujuan yang diinginkan (Jacobs & Jaques, 1990). Lebih jauh lagi, kepemimpinan dapat dikonsepsikan sebagai seni, keterampilan atau Kemampuan untuk menggerakkan sekelompok orang agar mengikuti atau mematuhi arahan pemimpin, serta membangkitkan motivasi mereka untuk melakukannya dengan antusias.

Menurut Millet (2011), Kepemimpinan strategis meliputi kemampuan untuk meramalkan, memiliki visi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menghasilkan perubahan strategis yang dibutuhkan. Pemimpin strategis memainkan peran penting dalam lingkungan kerja yang mudah terpengaruh oleh isu-isu kompleks dari dalam maupun luar organisasi. Kepemimpinan strategis melibatkan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi atau lembaga. Perencanaan ini harus menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan sebuah perubahan untuk menyelesaikan masalah. Beberapa faktor kunci dalam kepemimpinan strategis menurut Millet meliputi kemampuan untuk memandang organisasi secara keseluruhan, mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, dan menanamkan kesetiaan.

Aspek Kepemimpinan (Leadership) menjadi hal penting dalam penanganan dan penyelesaian konflik. Dalam kepemimpinan strategis, seorang pemimpin yang efektif tidak akan menunda, menghindari, atau mengalihkan konflik dalam masyarakat, tetapi harus bertindak sebagai penggerak utama dalam membangun mekanisme penyelesaian untuk mencapai perdamaian (Millet, 2011). Beberapa inisiatif Jika empat faktor atau kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, masalah kepemimpinan dapat memicu konflik, seperti yang terjadi pada akhir masa orde baru. Setelah era reformasi, kepemimpinan terkait konflik di Papua mengalami kemajuan dengan berupaya menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai contoh, Presiden Habibie membentuk Forum Rekonsiliasi Rakyat Papua (FORERI), Presiden Megawati menerapkan kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua, sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan penyelesaian yang damai, adil, komprehensif, dan bertanggung jawab melalui implementasi Otonomi Khusus

serta pendirian (UP4B) Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Sudira, 2022).

Konflik di Papua memiliki dimensi yang kompleks, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan isu-isu ideologis yang membentuk esensi konflik tersebut. Pergeseran kepemimpinan di setiap periode mengubah paradigma dalam penanganan isu Papua, dari pendekatan yang otoriter menjadi lebih humanis. Faktor kepemimpinan strategis menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk penyelesaian konflik. (Anugerah, 2019).

Kepemimpinan Presiden Soekarno dalam melihat konflik di Papua yaitu cenderung mengaggap bahwa konflik ini bersifat internasional karena masih terkait dengan sengketa wilayah antara Indonesia dan Belanda. Serangkaian konferensi diplomatik seperti Konferensi Malino, Konferensi Pangkalpinang, Perundingan Linggarjati, Konferensi Denpasar, dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda mengalami kegagalan (Meteray, 2012). Dalam menghadapi konflik di Papua Barat, Presiden Soekarno kemudian mengambil langkah dengan memperkenalkan Tri Komando Rakyat, yang berhasil meningkatkan dukungan masyarakat dalam upaya merebut wilayah tersebut. Kebijakan ini terbukti efektif dalam mengendalikan tingkat dan eskalasi konflik (Mambraku, 2015).

Pergeseran kekuasaan dan situasi politik yang ditandai dengan lahirnya rezim orde baru dengan presiden Soeharto sebagai puncak kepemimpinan. Dibawah kepemimpinan Soeharto, kebijakan yang dilakukan cenderung quasi-represif. Pendekatan keamanan militer berhasil membatasi luasan konflik di Masyarakat penggunaan kekuatan ABRI dalam menumpas gerakan separatisme OPM adalah ciri khas kepemimpinan orde baru. Rezim Orde Baru mengimplementasikan lima tahap operasi militer, dimulai dengan Operasi Bharatayudha (1966-1968) yang dipimpin oleh Pangdam XVII Cendrawasih

Brigjen R.R. Bintaro, diikuti oleh Operasi Wibawa (1968-1969) yang dipimpin oleh Brigjen Sarwo Edhi Wibowo. Operasi Pamungkas (1969-1973) yang dipimpin oleh Acub Zainal, serta Operasi Koteka dan Operasi Senyum (1977-1978) di bawah kepemimpinan Pangab M. Jusuf, menyusulnya. Operasi Gagak (1985-1990) dipimpin oleh Mayjen Ali Moertopo, dan Operasi Rajawali (1990-1998) di bawah kepemimpinan Mayjen Abinowo (Widjojo, 2010).

Penggunaan kekuatan militer dalam penanganan konflik di Papua, selain untuk menumpas OPM, juga bertujuan untuk meredam intensitas konflik. Aktivitas militer kemudian membatasi dan menekan pers sehingga keterbukaan informasi terkait konflik di Papua tidak tersampaikan. Kebijakan pemerintahan Orde baru juga mencakup transmigrasi serta birokrasi yang bertujuan mengendalikan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Secara luas, pembangunan pendidikan meningkat dalam hal jumlah, dari tingkat SD hingga Universitas, meskipun dengan kualitas yang rendah. Pelayanan medis juga kurang memadai, dan penguatan ekonomi rakyat terasa lemah. Akibatnya, masyarakat semakin terpinggirkan, mengalami kemiskinan, dan menghadapi marginalisasi yang semakin meningkat. (Mambraku, 2015).

Setelah pergantian kepemimpinan dari rezim Orde Baru ke era reformasi, usaha untuk menyelesaikan konflik di Papua hanya menghasilkan penyelesaian yang sementara, tanpa mencapai stabilitas yang berkelanjutan. Saat pemerintahan B.J. Habibie, Daerah Operasi Militer (DOM) dihapuskan dan didirikan Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (Foreri) sebagai platform untuk masyarakat Papua menyuarakan aspirasi mereka. Pada Februari 1999, terjadi pertemuan antara 100 tokoh Papua dan Presiden Habibie, dimaksudkan untuk membuka dialog dengan pemerintah pusat (Sudira, 2022).

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, keputusan untuk

mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua tidak terlepas dari sejarah yang memiliki makna penting bagi masyarakat Papua sendiri. Nama "Papua" pertama kali diperkenalkan oleh navigator Portugis, Antonio d'Arbrau, pada tahun 1521 M. Kata "Papua" diperkirakan berasal dari bahasa Melayu Kuno, "Pua-Pua," yang artinya keriting. Melalui proses penamaan yang sesuai dengan sejarahnya, harapan dibalik penamaan ini adalah agar masyarakat Papua merasa terhubung dengan identitas aslinya tanpa kehilangan akar budaya. Selain itu, masyarakat Papua juga diberikan izin untuk menggunakan bendera Bintang Kejora sebagai simbol kebudayaan (Zam & Himmawan, 2023).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua adalah kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Papua. Di era pemerintahan Megawati, kebijakan Otonomi Khusus ini diperkenalkan sebagai alternatif penyelesaian yang berbeda dari pendekatan militer, dan menjadi pendekatan konsiliasi yang diharapkan dapat diterapkan. Penerbitan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk mengambil pendekatan baru dalam mengatasi konflik di Papua. Pendekatan inovatif ini melibatkan perubahan dalam cara menangani masalah, berpindah dari fokus pada keamanan untuk mencapai stabilitas, menuju kepada pendekatan sosial yang mengejar kesejahteraan (Musa'ad, 2011). Kehadiran Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah solusi yang tepat, sambil menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki kekurangan dalam pembangunan yang telah terjadi sebelumnya.

Penerapan Otsus di Papua mempertimbangkan secara mendalam aspek budaya yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Papua. Melalui Otonomi Khusus ini, penduduk Papua diberi kebebasan untuk mengatur

pemerintahan mereka sendiri, mengelola sumber daya alam secara mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara optimal. Kebebasan ini mencakup hak otonomi dalam merancang strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan karakteristik unik sumber daya manusia, serta kondisi alam dan budaya di Papua (Anugerah, 2019).

Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penyelesaian konflik di Papua difokuskan pada penerapan Otonomi Khusus. Salah satu Langkah positifnya yaitu dengan membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), yang merupakan symbol desentralisasi kekuasaan di Papua. Ini berarti pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengeluarkan kebijakan. Namun kebebasan ini juga terbatas dalam hal hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan keuangan, serta urusan keagamaan dan hukum (Sudira, 2022). Penanganan dan penyelesaian konflik juga terus diupayakan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua telah berhasil mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Kebijakan Jokowi yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua telah meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua (Artada, 2022). Presiden Jokowi telah membawa angin segar dalam upaya penyelesaian konflik di Papua, yang terbukti dengan dukungan kuat yang diterimanya dari masyarakat Papua pada Pemilu 2019, di mana ia mendapatkan dukungan sebesar 70%. Komitmen yang ditunjukkan melalui serangkaian kunjungan resmi ke Papua menegaskan keseriusannya untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Dalam konteks ini, kemajuan dalam proses demokratisasi di Indonesia juga menjadi landasan penting yang menunjukkan bahwa konflik yang

kompleks di Papua dapat diselesaikan melalui mekanisme yang lebih inklusif, demokratis, dan akuntabel. (Sudira, 2022).

Dialog sebagai Upaya Resolusi Konflik di Papua

Kepemimpinan strategis mencakup kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan organisasi atau masyarakat menuju visi jangka panjang, sambil responsif terhadap perubahan lingkungan dan tantangan. Salah satu aspek krusial dari kepemimpinan ini adalah kemampuan sebagai mediator dalam situasi konflik, di mana seorang pemimpin harus mendengarkan dengan efektif, memahami kepentingan berbagai pihak, dan mencari solusi yang dapat diterima semua. Dalam konteks Papua, yang terkenal dengan konflik kompleks dan berkelanjutan, pendekatan strategis seperti dialog menjadi relevan. Melalui dialog, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan kelompok lainnya dapat bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, mengidentifikasi akar masalah, serta membangun kesepahaman untuk meminimalkan ketegangan dan memperbaiki hubungan di masa depan (Djen, 2022).

Penyelesaian konflik di Papua melalui dialog telah dibahas sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menggunakan istilah "Komunikasi Konstruktif". Selanjutnya, Forum Akademisi Papua Damai (FAPD) mengenalkan pendekatan ini dengan sebutan "Consensus Building". Dalam Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi juga tersirat jelas tentang Upaya penyelesaian persoalan Papua. Dialog merupakan mekanisme yang sejalan dengan semangat Nawacita, pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai yang merupakan bagian dari identitas bangsa, karena selalu menekankan pentingnya perdamaian. Akhirnya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan mencapai kesepahaman di mana perdamaian dianggap sebagai tujuan yang dapat diterima oleh semua pihak

(Sihaloho 2023). Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah melalui jalur dialog, yang sesuai dengan budaya Melanesia yang mementingkan musyawarah sebagai upaya penyelesaian konflik. Mekanisme dialog yang dimaksud adalah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Rekomendasi untuk mengadopsi pendekatan dialog juga didasarkan pada hasil penelitian dan studi yang beragam mengenai konflik di Papua. Namun, penting untuk dicatat bahwa dialog yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Papua (Widjojo et al., 2008).

Pertimbangan Budaya masyarakat Papua dalam dialog yang menjadi mekanisme resolusi konflik di Papua setidaknya memuat lima hal yaitu:

- a. Dialog harus mampu mengakomodasi berbagai identitas budaya dan posisi politik yang berbeda secara alami. Elemen-elemen seperti representasi, format, mekanisme, dan agenda dalam dialog harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Semakin besar kesepakatan dalam proses pra-dialog dan dialog, semakin tinggi pula legitimasi hasilnya. Tingkat legitimasi yang tinggi akan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi hasil dialog tersebut. Dialog harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi keberagaman budaya masyarakat Papua untuk diakui, sehingga suara-suaranya yang selama ini terpinggirkan dapat memiliki ruang yang cukup untuk mengekspresikan identitas kultural mereka yang beragam.
- b. Pemerintah perlu mengakui bahwa masyarakat Papua memiliki pandangan budaya yang beragam tentang cara dan mekanisme dialog politik. Keragaman ini berasal dari berbagai budaya dalam kepemimpinan tradisional di Papua. Negara harus memahami kembali

berbagai identitas budaya di Papua untuk menghindari pendekatan elit yang dapat membatasi ruang dialog yang beragam.

- c. Diperlukan dialog yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan melibatkan permintaan maaf atas kesalahan masa lalu, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat Papua.
- d. Dialog harus mampu mengubah paradigma negara yang menganggap Papua sebagai ancaman separatisme terhadap persatuan nasional. Penggunaan narasi separatisme oleh pemerintah pusat sering kali menyebarkan ketakutan yang mempengaruhi semangat nasionalisme Indonesia. Hal ini dapat memberikan legitimasi terhadap tindakan kekerasan terhadap masyarakat Papua, yang didasarkan pada pemahaman yang keliru dan mendukung pelanggaran hak asasi manusia. Pemahaman ini perlu direvisi dan dihapuskan sepenuhnya.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik Papua merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan kepemimpinan strategis dari pemerintah Indonesia. Sejak awal konflik yang bersifat internasional di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, konflik Papua telah bertransformasi menjadi konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat Papua. Di bawah Orde Baru, pendekatan yang dominan adalah pendekatan militer dengan kebijakan yang cenderung represif, yang memperdalam jurang antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Pasca reformasi, terdapat upaya-upaya signifikan untuk mencari solusi melalui pendekatan dialogis dan pemberian Otonomi Khusus yang diinisiasi oleh pemerintahan B.J. Habibie dan dikembangkan lebih lanjut pada masa

pemerintahan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Jokowi. Dukungan yang besar dari masyarakat Papua menjadi alasan mengapa di masa pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian konflik Papua menggunakan mekanisme dialog sebagai sangat memungkinkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu musyawarah mufakat.

Dalam konteks kepemimpinan strategis, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, dengan tetap memastikan implementasi Otonomi Khusus yang efektif dan adil. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan, membangun kepercayaan, dan memperkuat kedekatan antara pemerintah pusat dan daerah Papua, menuju penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan harmonis di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, H. (2016). Janji penyelesaian 11 pelanggaran HAM di Papua. BBC Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_ham_papua
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *JURNAL KAJIAN LEMHANNAS RI*, 51-65.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.111>
- Artada, Y. (2022). Jokowi Dinilai Humanis, Bisa Meredam Konflik dan Sejahterakan Masyarakat Papua. Jakarta Selatan: JPNN.com.
<https://mediaindonesia.com/nusantara/529073/jokowi-dinilai-humanis-bisa-meredam-konflik-dan-sejahterakan-masyarakat-papua>
- Burton, J. W. (1990). *Conflict: Resolution and prevention*. St. Martin's Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Firdausi, F. A. (2019). Sejarah Kemerdekaan Papua Barat dari Belanda dan Gabung NKRI. Jakarta
- Djeen, A. A. (2022). Upaya-Upaya Indonesia dalam resolusi konflik papua. *JURNAL SOSIO-KOMUNIKA*, 1(2), 175–193.
<https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.27>
- Pamungkas, C. (2015). Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana Pada masa trikoran Dan Pepera. *Paramita: Historical Studies Journal*, 25(1).
<https://doi.org/10.15294/paramita.v25i1.3423>
- Pusat: Tirto.id. <https://tirto.id/sejarah-kemerdekaan-papua-barat-dari-belanda-gabung-nkri-egyR>
- Jacobs, T. O., & Jaques, E. (1990). Military executive leadership. In K. E. Clark & M. B. Clark (Eds.), *Measures of leadership* (pp. 281-295). West Orange, NJ: Leadership Library of America.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 82-98.
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>
- Kusumawati, R. (2019). Problematika PEPERA dalam Integrasi Papua ke Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 14(2), 120-135.
- Mambraku, N. S. (2015). Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik. *Jurnal Kajian*, 75-85.
<http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v20i2.571>
- Meteray, B. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Millet, J. D. M. (2011). *Manajemen: Prinsip & Penerapan dalam kepemimpinan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Musa'ad, M. A. (2011). Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan. *Jurnal Kajian*, 359.
https://uilis.usk.ac.id/serial/index.php?p=show_detail&id=29649
- Rauch, C. F., & Behling, O. (1984). *Functionalism: Basis for alternate approach to the study of leadership*. New York, NY: Pergamon Press.
- Sagita, D. E. (2021). Konflik dan Solusi Papua Merdeka dalam Pemikiran Paul Feyerabend. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 182-187.
<https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i6.440>
- Saputra, M. N. (2019). Diskriminasi TERHADAP Masyarakat Papua Ditinjau Dari Teori Konflik. <https://doi.org/10.31219/osf.io/d5ae4>
- Sihaloho, R. A. (2023). Narasi dialog Damai Papua-Jakarta Dalam Bingkai Ketahanan Nasional Dan Implementasinya. *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 93–103.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1184>
- Sudira, I. N. (2022). Resolusi Konflik sebagai Jalan Perdamaian di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 82-95.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5974.82-95>
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kenijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Widjojo, M. (2009). *Papua Roadmap: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Tifa Foundation.
- Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Pamungkas, A. C., & Dewi, R. (2008). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Zam, M. Z., & Himmawan, D. (2023). Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Kasus Papua. *Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1-10.
<https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.10>